

## Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Djenni Sasmita<sup>1</sup>, Kimsen<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia<sup>1,2</sup>

[jennysasmita0@gmail.com](mailto:jennysasmita0@gmail.com)<sup>1</sup>, [kimsensn88@gmail.com](mailto:kimsensn88@gmail.com)<sup>2</sup>

Diserahkan tanggal 17 Januari 2023 | Diterima tanggal 25 Maret 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2023

### Abstract:

*This study aims to determine the effect of justice on tax evasion, to determine the effect of discrimination on tax evasion, and the effect of the taxation system on tax evasion. The results of this study are expected to be useful for the tax office and used as input and consideration in understanding the effect of justice, discrimination and taxation system on taxpayers' perceptions of the ethics of tax evasion. The research method used is qualitative research where the research aims to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. The analytical method used is descriptive analysis, instrument test, classical assumption test, hypothesis test and multiple linear equation test. The instrument used is a questionnaire. Based on research and discussion on justice, discrimination, and the tax system against tax evasion. Taxpayers' perceptions of justice, discrimination, and the taxation system together have an effect on tax evasion. This is evidenced by the results of the significance value of the F test of 0.000 which is smaller than 0.05. This means that the better or not the perception of taxpayers regarding justice, discrimination, and the tax system, it will affect the practice of tax evasion in the Tangerang area.*

**Keywords:** *embezzlement, discrimination, justice, perception taxpayers.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap penghindaran pajak, untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap penghindaran pajak, dan pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor pajak dan digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan, diskriminasi dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji persamaan linier berganda. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya semakin baik atau tidaknya persepsi wajib pajak mengenai keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan, maka akan mempengaruhi praktek penghindaran pajak di wilayah Tangerang.*

**Kata kunci :** *pajak, penggelapan, perlakuan, keadilan, persepsi wajib pajak.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Sumber penerimaan dan pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara. Dalam Undang-Undang perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai Warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan karena kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya.

Penelitian ini mengacu pada peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Faradiza, 2018), yang dilakukan di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan mengungkapkan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan juga oleh (Suryaputri & Averti, 2019), yang dilakukan di Jakarta Barat dengan mengungkapkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak; Penelitian lain juga dilakukan oleh (Pratiwi & Prabowo, 2019), yang dilakukan di Salatiga dengan mengungkapkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. *Self Assessment System* adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak tarif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. *With Holding System* adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPH/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji persepsi wajib pajak mengenai keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak yang memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama wilayah Kosambi. Penelitian ini memilih tempat yang berada pada kantor pelayanan pajak di wilayah Kosambi. Pemilihan tempat tersebut berdasarkan objek penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian akan berfokus pada wajib pajak orang pribadi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kosambi memiliki data yang lengkap mengenai wajib pajak. Oleh karena itu penulis memutuskan memilih lokasi tersebut untuk dilakukan penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan *metode convenience* sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti (Sugiyono, 2018). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah

untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang di ambil yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar pada kantor pelayanan 42 pajak (KPP) yang ada di wilayah Kosambi. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena ingin mengetahui informasi yang berkaitan tentang persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak maka peneliti memilih wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP sebagai sampel penelitian. Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP dan terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama (KPP) Kosambi tahun 2020.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuesioner. Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan teknik *personally administered questionnaires*, yaitu kuesioner yang memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2016:154). Dalam proses pendistribusian kuesioner ini peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Data yang diterima dalam kuesioner berupa data ordinal. Pada umumnya jawaban responden yang diukur menggunakan skala likert diadakan scoring yaitu pemberian nilai numerikal 1,2,3,4, dan 5. Setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran ordinal. Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif cenderung digunakan pada penelitian kualitatif.

## PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dibentuk sebagai pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan *Good Governance* dan peningkatan penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang di dalam pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja Dan Saat Mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Banten.

### A. Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di KPP Pratama wilayah Tangerang yaitu : KPP Pratama Kosambi. Sampel diambil dengan metode *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukur dan bersifat kooperatif.

Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan tentang persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, maka peneliti memilih wajib pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian dengan penyebaran atau pembagian kuesioner yang dilakukan pada tanggal 1 Juni s.d 30 juni 2022. Dimana data distribusi sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Data Distribusi Sampel Penelitian**

No	Kuesioner Variabel Penggelapan Pajak	Jumlah yang dibagikan ke WPOP
1	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.	67
2	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.	
3	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.	
4	Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT.	
5	Saya berpendapat bahwa ada wajib pajak yang berusaha menyuap pegawai pajak.	
6	Wajib pajak memberikan hadiah kepada pegawai pajak dalam usahanya melakukan penyuapan.	
7	Wajib pajak dalam usaha penyuapan dilakukan dengan mengatakan secara terang-terangan.	
No	Kuesioner Variabel Keadilan	Jumlah yang dibagikan ke WPOP
1	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.	67
2	Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.	
3	Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkatan pendapatan wajib pajak.	
4	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang - Undang tanpa membeda - bedakan wajib pajak.	
5	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.	
No	Daftar Pertanyaan Variabel Diskriminasi	Jumlah yang dibagikan ke WPOP
1	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.	67
2	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian dan tebang pilih kepada wajib pajak.	
3	Menurut saya, kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan npwp merupakan bentuk diskriminasi.	
4	Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi.	
5	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.	
No	Kuesioner Variabel Sistem Perpajakan	Jumlah yang dibagikan
1	Saya menyetor pajak tepat waktu.	67
2	saya melakukan proses perhitungan dan pelaporan pajak sendiri.	
3	Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kesadaran sendiri selaku warga negara yang baik.	
4	Saya paham tentang proses memperoleh NPWP.	
5	Saya menghitung pajak secara lengkap dan benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.	
6	Saya paham tentang proses perhitungan pajak.	

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 67 buah, kuesioner yang telah kembali 67 buah dan kuesioner yang tidak kembali 0 buah.

Tabel 4.2 Ringkasan Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner

NO.	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE %
1.	Jumlah Kuesioner yang dibagikan	67	100%
2.	Jumlah Kuesioner yang kembali	67	100%
3.	Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	0	0%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribumi yang Terdaftar dan Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP kosambi tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Tingkat persentase kepatuhan WPOP	kepatuhan WP OP
2017	325,438	55%	kurang Patuh
2018	345,397	75%	kurang Patuh
2019	364,790	87%	cukup patuh
2020	399,974	89%	cukup patuh
2021	420,559	95%	cukup patuh

Sumber : Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 dapat dilihat ringkasan pengiriman dan pengambilan kuesioner dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi Tangerang terus meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diikuti dengan meningkatnya jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Asumsi penelitian lainnya yaitu semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak wajib pajak yang akan menjawab tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di wilayah Tangerang. Kuesioner yang disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan pegawai, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang *balance*.

### 1. Penyajian Data Responden

Penyajian data responden ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang wajib pajak yang menjadi responden dalam pengisian kuesioner penelitian. Berikut ini adalah gambaran dari responden penelitian.

Tabel 4.4  
Penyajian Data Reponden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
Laki-laki	22	41%
perempuan	45	59%
Jumlah responden	67	100%
<b>Umur Responden</b>		
20-24 tahun	20	28%
25-35 tahun	45	69%
> 35 tahun	2	3%
Jumlah responden	67	100%
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
D3	40	69%
S1	24	28%
S2	3	3%
Jumlah Responden	67	100%
<b>Pekerjaan</b>		
Pegawai Negri	8	5%
Pegawai Swasta	59	85%
Wiraswasta	0	0%
Jumlah Responden	67	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan penyajian data dari kuesioner yang disebar kepada responden penelitian yang berasal dari wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kosambi (KPP).

## 2. Penyajian Data Variabel Penelitian

Penyajian data variabel penelitian menjelaskan tentang hasil tanggapan kuesioner yang diisi oleh para responden. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi dan sistem perpajakan. Dan variabel dependennya adalah penggelapan pajak. Tabel 4.5 dan tabel 4.6 adalah penyajian data variabel penelitian:

Tabel 4.5 Penyajian Data Variabel Penelitian Data WPOP Tahun 2017-2021

no		penggelapan pajak	keadilan	Diskriminasi	Sistem Perpajakan
1	Sangat Tidak Setuju	239	30	63	26
2	Tidak Setuju	330	112	216	134
3	Setuju	234	537	333	561
4	Sangat Setuju	216	548	212	756

Sumber : Data primer diolah, 2022

4.6 Target Pemeriksaan Pajak Tahu 2017-2018

Tahun	Target pemeriksaan (RP)	Tingkat efektivitas	Ket
2017	9.355.140.000	2,79%	tidak efektif
2018	20.229.000.000	2,75%	tidak efektif
2019	5.000.000.000	14,68%	tidak efektif
2020	31.520.630.000	4,58%	tidak efektif
2021	4.500.000.000	107,34%	sangat efektif

Sumber : Data primer olahan, 2022

Perhitungan data dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh wajib pajak. Kuesioner ini berisi pertama

pertanyaan -pertanyaan yang harus diisi oleh responden dan perhitungan ini menggunakan skala likert.

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas data dari kuesioner yang sudah diteliti yaitu nilai minimum, maximum, mean, dan Standar deviasi variabelnya.

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Mean	Std. Deviation
KEADILAN (X1)	67	7.00	15.4627	3.31812
DISKRIMINASI (X2)	67	4.00	10.0448	2.25249
SISTEM PERPAJAKAN (X3)	67	7.00	19.3881	4.41058
PENGGELAPAN PAJAK (Y)	67	7.00	13.5224	4.99199
Valid N (listwise)	67			

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) yang valid dan dapat diproses lebih lanjut yaitu sebanyak 67 responden. Pada variabel keadilan, skor jawaban minimum responden sebesar 7.00, dengan skor mean jawaban sebesar 15.4627 dan standar deviasi sebesar 3.31812. Pada variabel diskriminasi, skor jawaban minimum responden sebesar 4.00, dengan skor mean jawaban sebesar 10.0448 dan standar deviasi sebesar 2,25249. Pada variabel sistem perpajakan, skor jawaban minimum responden 7.00, dengan skor mean jawaban sebesar 19.3881 dan standar deviasi sebesar 4.41058. Pada variabel penggelapan pajak, skor jawaban minimum responden 7, dengan skor mean 13.5224 dan standar deviasi sebesar 4.99199.

## 2. Uji Instrumen

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau rhitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan rtabel. Nilai rtabel 0,240, didapat dari jumlah kasus – 2, atau  $67 - 2 = 65$ , tingkat signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,240. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasi yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan rtabel (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (rhitung) > rtabel. Tabel 4.10 dan tabel 4.11 dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dan variabel keadilan dengan 67 sampel responden.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan**

Item Pertanyaan	Nilai Validitas (rhitung)
item 1	0,760
item 2	0,772
item 3	0,849
item 4	0,815
item 5	0,843
item 6	0,816

**4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelapan Pajak**

Item Pertanyaan	Nilai Validitas (rhitung)
item 1	0,681
item 2	0,838
item 3	0,811
item 4	0,745
item 5	0,657
item 6	0,758
item 7	0,608

Variabel sistem perpajakan terdiri atas 6 butir pernyataan, dari ke – 6 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel dibawah ini 66 menunjukkan hasil uji validitas dari variabel sistem perpajakan dengan 67 sampel responden.

Variabel penggelapan pajak terdiri atas 7 butir pernyataan, dari ke – 7 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel).

Selanjutnya uji reliabilitas dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan program SPSS 24. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 dalam (Ghozali, 2016).

**Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Perpajakan**

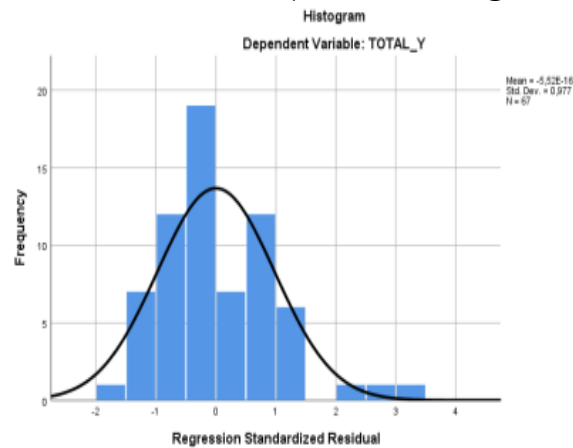
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.890	6

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.14 menunjukkan nilai cronbach's alpha atas variabel sistem perpajakan sebesar 0,890 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60.

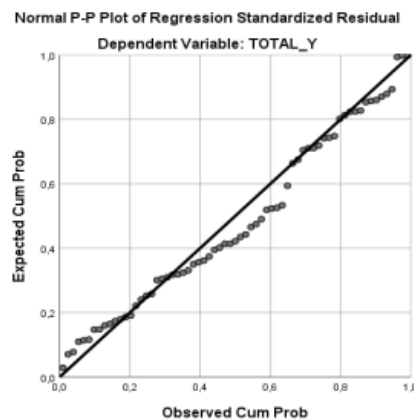
## 3. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang didistribusikan kepada responden normal sehingga dapat digunakan untuk penelitian. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut.

**Gambar 4.2 Hasil Uji Grafik Histogram**

Sumber : data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan gambar 4.2 grafik histogram diatas menunjukkan bahwa hasil uji histogram menunjukkan distribusi data bersifat normal. Hal ini dapat dilihat dengan grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

**Gambar 4.3 Hasil Uji Grafik Normal Probablibility Plot**

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa hasil uji grafik normal probablibility plot ( P-P Plot ) terdistribusi normal, terlihat bahwa titik terbesar disekitar garis diagonal dan titik-titik tersebut masih menguti 70 garis diagonal. Berdasarkan pada hasil analisis grafik maka dapat dinyatakan bahwa model telah memenuhi uji asumsi normalitas.

**Gambar 4.16 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,04282730
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,067
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,190 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada uji Kolmogrov-Smirnov yaitu sebesar  $0,190 > 0,05$  hal ini berarti data terdistribusi dengan normal dan layak digunakan untuk penelitian.

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Dalam pengujian ini menggunakan uji Durbin Watson. Tidak terdapat gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak diantara DU sampai dengan 4-DU ( $DU < DW < 4-DU$ ). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,556 <sup>a</sup>	,310	,264	4,31155	2,236
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, TOTAL_X1, TOTAL_X2, TOTAL_X3					
b. Dependent Variable: TOTAL_Y					

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) yaitu sebesar 2,236. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada nilai signifikan 0,05, jumlah sampel (n) sebanyak 67, jumlah variabel independen (k) sebanyak 3, dan diperoleh nilai DU yaitu 1966, serta nilai 4-DU =  $4-1966$  yaitu sebesar 2,301. Dengan demikian diperoleh nilai  $DU < DW < 4-DU$  ( $1966 < 2,236 < 2,301$ ) yang berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke residual satu pengamatan yang lain. Dalam pengujian ini menggunakan uji glejser, dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,837	4,363		3,171	,002
TOTAL_X1	-1,018	,270	-,461	-3,777	,000
TOTAL_X2	1,066	,242	,489	4,411	,000
TOTAL_X3	,236	,202	,137	1,171	,246

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan hasil uji glejser, didapatkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yaitu keadilan sebesar 0,000, variabel 0,000, variabel sistem perpajakan sebesar 0,246. Dimana syarat signifikansi pada uji gleser adalah 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai Variance 73 Inflantions Factor (FIV) < 10 dan nilai tolerance > 0,1 berarti bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13,837	4,363		3,171	.002		
TOTAL_X1	-1,018	,270	-.461	-3,777	.000	,752	1,329
TOTAL_X2	1,066	,242	,489	4,411	.000	,913	1,096
TOTAL_X3	,236	,202	,137	1,171	,246	,817	1,224

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel keadilan sebesar 0,752, variabel diskriminasi 0,913, variabel sistem perpajakan sebesar 0,817. Sedangkan nilai VIF untuk variabel keadilan sebesar 1,329, variabel diskriminasi 1,096, variabel sistem perpajakan 1,224. Dari nilai tolerance dan VIF seluruh variabel tersebut, didapatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4. Uji Hipotesis

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,579 <sup>a</sup>	,336	,292	4,16672

a. Predictors: (Constant), Total\_X3, Total\_X2, Total\_X1

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa di Model Summary besarnya adjusted R squared adalah 0,292 menyatakan bahwa 29,2 persen variasi pengeluaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan. Sedangkan sisanya (100% - 29,2 % = 70,8%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamasama. jika nilai signifikansi < 0,05 atau f hitung > f tabel, maka itu berarti variabel-variabel secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian ini. Tabel 4.21 Hasil uji f adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.21 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508,404	4	127,101	6,837	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1133,960	61	18,590		
	Total	1642,364	65			

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y  
b. Predictors: (Constant), LAG\_Y, TOTAL\_X1, TOTAL\_X2, TOTAL\_X3

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel penggelapan pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individual. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka itu berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.22 Hasil uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,837	4,363		3,171	,002
	TOTAL_X1	-1,018	,270	-,461	-3,777	,000
	TOTAL_X2	1,066	,242	,489	4,411	,000
	TOTAL_X3	,236	,202	,137	1,171	,246

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan Tabel 4.22 diatas menunjukkan hasil uji t dengan t tabel pada taraf  $\alpha = 0,05$  dengan  $df (n-k-1) = 67-3-1 = 63$  dan diperoleh t tabel sebesar 1,998.

Variabel sistem perpajakan menunjukkan nilai t hitung 1,171 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,998, dengan nilai signifikansi 0,246  $> 0,05$  dengan demikian berarti bahwa sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

## 5. Persamaan Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari nilai persamaan dari variabel dependen dan variabel independen dan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hasil dari pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.23 Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,837	4,363		3,171	,002
	TOTAL_X1	-1,018	,270	-,461	-3,777	,000
	TOTAL_X2	1,066	,242	,489	4,411	,000
	TOTAL_X3	,236	,202	,137	1,171	,246

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.23 diatas menunjukkan persamaan regresi linear berganda yaitu : Bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Jika variabel dimasukkan kedalam rumus tersebut menjadi :

$$Y = 13,837 - 1,018 + 1,066 + 0,236 + e$$

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 67 orang wajib pajak pada wilayah Tangerang. Berdasarkan pada data yang telah disimpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil uji regresi ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika tingkat keadilan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak akan semakin tinggi. Persepsi Wajib Pajak mengenai diskriminasi mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa semakin baik atau tidak baiknya persepsi wajib pajak mengenai diskriminasi, maka tidak akan mempengaruhi praktik penggelapan pajak di wilayah Tangerang. Persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi uji t sebesar 0,246 lebih besar 0,05. Artinya Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya semakin baik atau tidaknya persepsi wajib pajak mengenai keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan, maka akan mempengaruhi praktek penggelapan pajak di wilayah Tangerang.

Adapun keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya Ketidakterbukaan dan ketakutan wajib pajak orang pribadi saat ditanyain/diminta mengisi kuesioner mengenai pajak serta Penelitian ini hanya menguji persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak masih ada sejumlah variabel yang juga mempengaruhi tindakan tax evasion atau penggelapan pajak yang belum dimasukkan kedalam penelitian. Hasil menyatakan bahwa keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak pada wilayah Tangerang maka perlu adanya analisis dan tindak lanjut mengenai keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan. Dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya diantaranya; penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya sehingga dapat mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik, Tidak hanya menggunakan kuesioner tetapi juga melakukan wawancara secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

Abrahams dan Kristanto. (2016). *Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado)*. Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung.

- Adam Smith, dikutip dalam Y. (2017). *(Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado)*. Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung.
- Dkk, S. (2020). *Pengaruh pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)*. Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Mitsla Egil Izliachyra.
- Faradiza, S. A. (2018). *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Harmi. (2017). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka)*. Rizal Sukma Aliyudin, Eva Fauziah Ahmad, Nissa Nizhan.
- Himawan. (2017). *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Sekar Akrom Faradiza.
- Karlina. (2020). *Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)*. Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Mitsla Egil Izliachyra.
- Kelley, H. (1972). *Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)*. Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Mitsla Egil Izliachyra.
- Mardiasmo. (2011). *Analisis Perbitungan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv Delta Dharma*. Shinta Ismail, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono.
- Mardiasmo. (2016). *Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi Dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Mulur Veronika, Muhammad Saleh.
- Mardiasmo. (2016b). *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. Ancilla Regina Averti, Rossje Vitarimetawatty Suryaputri.
- Mardiasmo. (2016c). *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak*. Risma Novitaningsih, Nur Diana, Afifudin.
- Marlina. (2018). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka)*. Rizal Sukma Aliyudin, Eva Fauziah Ahmad, Nissa Nizhan.
- Noviari, C. &. (2019). *Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)*. Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Mitsla Egil Izliachyra.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). *Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/af.v2i1.3008>
- Riza. Amalia, D. dan A. &, & Padnyawati. (2019). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka)*. Rizal Sukma Aliyudin, Eva Fauziah Ahmad, Nissa Nizhan.
- Sariani et al. Monica & Arisman. (n.d.). *Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Enggar Pratiwi dan Ronny Prabowo.
- Soemitro. (1992). *Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)*. Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Mitsla Egil Izliachyra.
- Suandy. (2017). *Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)*. Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Mitsla Egil Izliachyra.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Wikipedia. (2016). *(Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi Dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Mulur Veronika, Muhammad Saleh.
- Winarsih. (2018). *(Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado)*. Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung.

Zain, dikutip dalam A. (2017). *Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado)*. Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung.